

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibumi ini terdapat ragam benua yang diisi dengan ragam negara, yang diciptakan tuhan untuk makhluknya, dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya negara Indonesia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah dan indah, diantara sumber daya alamnya terdapat; pulau, gunung, laut, hutan dan objek alam lainnya. Selain itu Indonesia juga memiliki ragam budaya, bahasa, ras, adat yang unik dan menarik, sehingga banyak dikenal di seluruh penjuru negara dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan bidang pariwisata.

Dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa keadaan alam flora dan fauna sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, peninggalan purbakala¹, peningkatan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD NKRI tahun 1945². Dalam UU No 10 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan juga bahwasanya kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

¹ Zaman dahulu sekali; KBBI Kamus Versi Onlie. <https://kbbi.web.id/purbakala>

² UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa serta;
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa³.

Salah satu daerah yang selalu mengembangkan bidang pariwisata yaitu Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, Kab. Ciamis memiliki 21 objek wisata, diantaranya 6 objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kab. Ciamis, 5 objek wisata dikelola oleh perum perhutani dan 10 objek wisata dikelola oleh pemerintah desa setempat. Akan tetapi, setelah berdirinya Kab. Pangandaran pada tahun 2012, objek wisata di Kab. Ciamis berkurang, sebagaimana berdasarkan uud no 9 tahun 1990 tentang objek dan daya tarik wisata, di Kab. Ciamis dibagi kedalam 4 kategori:

1. Objek dan daya tarik wisata budaya sebanyak 6 objek wisata, yaitu Situ Lengkong Kec. Panjalu, CiPanjalu, Situ Hariang kuning dan hariang Kencana Kec. Panjalu, Astana Gede Kec Kawali, Kampung Kuta Kec. Tambaksari, Museum Fosil Kec. Tambaksari dan situs Gunung Susuru Kec. Cijeungjing, Karangkamulyan Kec. Cijeungjing, Candi Ronggeng Kec. Pamarican.

³ UU No 10 tahun 2009 pasal 4 Tujuan Kepariwisata

2. Objek dan daya tarik wisata minat khusus sebanyak 5 objek wisata yaitu Curug Tujuh di Kec. Panjalu, Curug Tilu Kec. Cihaurbeuti, wisata Tapos Kec. Sadananya, Batu Cakra Penangkaran Rusa Kec. Cikoneng, Air Panas Cikupa Kec. Banjarsari.
3. Objek wisata alam, Situ Cibubuhan Kec. Sukamantri.
4. Objek wisata buatan, seperti Kolam Renang Winaya Kec. Ciamis dan Waterboom Ijakan Kec. Cipaku. (RPJPD Kab. Ciamis tahun 2005-2025 perubahan ke 11).

Seiring dengan berkembangnya Kab. Ciamis, sampai saat ini sektor wisata lebih meningkat, tercatat ada 284 sektor wisata di Kab. Ciamis (Data Potensi Wisata-DISPAR). Dari beberapa sektor wisata yang tercatat di data potensi wisata dinas pariwisata Ciamis, salah satunya terdapat Wisata Alam Religi⁴ yang dikenal dengan Situ Lengkong Panjalu. Yang mana sektor wisata ini sangat populer, dan terkenal diseluruh daerah sampai luar pulau Jawa. Sektor wisata alam dan budaya Situ Lengkong Panjalu berada di desa Panjalu yang diresmikan pada tanggal 21 Februari 2019, sebagai kawasan Cagar Alam sesuai dengan SK Jenderal Gubernur Hindia Belanda dan pada tanggal 17 Maret 2004, kawasan Situ Lengkong Panjalu diresmikan oleh Pemprov Jawa Barat sebagai Desa Wisata.

⁴ Wisata Religi adalah salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan sisi religius atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia. (Bab II) <http://repository.radenfatah.ac.id/10431/2/BAB%20II.pdf>)

Desa Panjalu merupakan desa tertinggi dalam pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) se-Jawa Barat di tahun 2021, yang meraih peringkat pertama, karena keberhasilannya dalam memenuhi 3 indeks didalam indikator IDM⁵ nya.

Sampai saat ini penghasilan yang didapat yang dihasilkan dari objek wisata situ lengkong Panjalu, menghasilkan ratusan juta yang dibagi dengan sistem kelola bagi hasil 60% yang diberikan ke PEMDA Ciamis dan 40% untuk desa Panjalu. (rri.co.id, 2022) dan tercatat dalam PERBUP No. 12 Tahun 2020. Akan tetapi sangat disayangkan, IDM di tingkat Nasional menduduki peringkat ke-6 dari 81.616 desa di Indonesia yang dikategorikan sebagai desa yang maju.

Gambar 1.1
Desa Nilai Tertinggi IDM Tahun 2021



Sumber: Ciamis.Info 2021

Salah satu permasalahannya pengelolaan sektor wisata situ lengkong Panjalu yang kurang di perhatikan dan dimaksimalkan dalam memperbaiki

⁵ Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks kesehatan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/Lingkungan. (DPMPD DUKCAPIL NTB) <https://dpmpddukcapil.ntbprov.go.id/index.php/2020/05/28/apa-itu-idm-indeks-desa-membangun/>

fasilitas yang ada di lingkungan sektor wisata situ lengkong Panjalu diantaranya; permasalahan pengelolaan infrastruktur, kebersihan dan keamanan lingkungan yang ditanggung jawab oleh pemerintah daerah dan desa tersebut, masih jauh dari kata belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab dan kewenangannya terhadap pengelolaan sektor wisata. Dimana sektor wisata religi ini, sudah sangat populer dikalangan masyarakat, sampai meningkat kunjungan dan pendapatan yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan. Dengan melihat data pengunjung dan penghasilan yang ada, hasil operasional sektor wisata situ lengkong pada tahun 2022 setelah pandemi selama 6 bulan dapat dilihat dari tabel di bawah ini;

Tabel 1.1
Data Pengunjung dan Penghasilan Sektor Wisata Alam Situ Lengkong Panjalu Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pengunjung	Pembayaran Masuk
1	Januari	89.534	89.534.000
2	Februari	10.169	10.169.000
Harga tiket masih Rp.1000			
28 Februari 2022 Harga tiket naik, menjadi Rp.5000			
3	Maret	39.264	196.320.000
4	April	Libur karena Puasa	
5	Mei	34.389	171.945.000
6	Juni	14.168	70.840.000
Jumlah		187.534	538.808.000

Sumber: Buku Pendataan Pengunjung Situ Lengkong Panjalu

Akan tetapi, setelah Panjalu meraih prestasi di tingkat provinsi atau nasional terkait IDMnya, sampai saat ini pemerintah Kab. Ciamis masih belum sepenuhnya memberikan kontribusi untuk pengelolaan situ lengkong Panjalu yang mana pengelolaan harus lebih ditingkatkan dengan melihat tingkatan pengunjung sampai saat ini semakin meningkat. Pemkab Ciamis sendiri belum

melihat langsung kondisi Situ Lengkong Panjalu yang menjadi harapan Pemerintah Desa Panjalu dan masyarakat sekitar agar dapat memberikan bantuan dana pengelolaan sektor wisata seperti desa yang lain yang menerima bantuan miliaran rupiah untuk mengelola sektor wisata menjadi lebih baik (rri.co.id, 2022)

Melihat kondisi lingkungan sektor wisata situ lengkong Panjalu saat ini, Dari segi pengelolaan infrastruktur jalan setapak sekeliling Situ Lengkong Panjalu, kebersihan lingkungan situ lengkong, keamanan didalam dan diluar lingkungan sektor wisata situ lengkong, masih jauh dari kata baik. Seperti dari hasil observasi, keadaan infrastruktur yakni jalan setapak di sekeliling sektor wisata alam situ lengkong Panjalu yang menjadi arah lalu lalang bagi para wisatawan dan masyarakat sekitar yang berkegiatan masih jauh dari kata sempurna seperti contoh:

Gambar 1.2
Jalanan Rusak



Sumber: Hasil Observasi (21 Mei 2022)

Jalan yang sudah roboh dan tidak tertata, jalanan yang menjadi licin jika hujan tiba, bahkan rumput-rumput yang liar menghalangi jalanan, dan sampah yang berserakan membuat para wisatawan maupun masyarakat sekitar terganggu

untuk melakukan berbagai kegiatan, sehingga dapat menimbulkan beberapa pertanyaan bahkan penilaian tidak baik terhadap kawasan situ lengkong Panjalu ketika ingin melihat pemandangan sekitaran Situ Lengkong Panjalu. Tidak hanya masyarakat dan para wisatawan yang berlalu lalang melainkan kendaraan roda dua yang banyak melintasi jalanan setapak tersebut menjadi penyebab kerusakannya jalan yang tidak semestinya jalanan setapak tersebut tidak dilalui oleh kendaraan roda dua. Seharusnya ada kebijakan pemerintah terkait tidak masuknya kendaraan roda dua ke lingkungan sektor wisata, karena permasalahan tersebut tentunya dapat mengganggu masyarakat bahkan wisatawan dalam melakukan aktifitasnya dan mempengaruhi terhadap kerusakan jalan setapak yang memiliki kualitas dan kuantitas kecil untuk digunakan.

Tidak hanya masalah infrastrukturnya saja melainkan adanya sebagian dari masyarakat, baik masyarakat asli atau pendatang yang melakukan perdagangan di lingkungan sektor wisata dengan mendirikan toko kecil di jalanan setapak, bahkan tidak tertatanya pembangunan toko-toko kecil. Dimana para wirausahawan mendirikan toko tanpa adanya aturan ataupun ketegasan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah terkait pendirian toko-toko kecil harus seperti apa dan dimana. Walaupun pemerintah desa dan daerah sudah menyiapkan kios serta fasilitas lainnya di lingkungan sektor tersebut akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang mendirikan semaunya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petugas dari UPTD Perparkiran plus sebagai pedagang (Haris Sunandar):

“Toko-toko kecil yang didirikan di ujung jalan setapak sekeliling situ lengkong Panjalu yang berada di sebelah utara, itu masing-masing tidak ada tanggung jawab pemerintah, kecuali kios yang dibawah dan diatas yang menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Sebagai contoh, Toko yang didirikan di tengah jalan dan toko yang didirikan tanpa campur tangan pemerintah.

Gambar 1.3
Bangunan Toko di Pertengahan Jalan



Gambar 1.4
Bangunan Toko



Sumber: Hasil Observasi (21 Mei 2022) Sumber: Hasil Observasi (21 Mei 2022)

Tidak hanya masalah infrastruktur yang menjadi bahan penelitian, melainkan kesadaran masyarakat atau para wisatawan yang berkunjung, dalam menjaga kebersihan lingkungan situ lengkung Panjalu yang dikenal dengan wisata religinya, banyak sekali masyarakat yang tidak menjaganya baik masyarakat yang tinggal di lingkungan situ lengkung Panjalu ataupun para wisatawan. Melihat Keadaan air situ lengkung Panjalu yang memiliki sejarah besar dimana ada mitos dibalik cerita yang sampai saat ini dipercaya adanya, sebuah naga besar sebagai sosok penjaga danau dan sepasang harimau jadi jadian yang dianggap sebagai cucu dari Prabu Siliwangi. Dan Maung Panjalu dipercaya sebagai penjaga kelestarian alam Situ dan air situ lengkung Panjalu yang bukan tercipta dari air biasa melainkan dari tetesan Air Zam-zam yang dibawa oleh seorang putra mahkota yang bernama borosngora. Dan kini sudah banyak tercemari oleh limbah

rumah tangga yang mengalir dan bercampur dengan air situ lengkong, hampir sebagian masyarakat memanfaatkannya untuk mencuci, membersihkan alat-alat dapur dan makan, dijadikan tempat berenang oleh anak-anak kecil bahkan remaja yang tinggal di kawasan situ lengkong Panjalu sehingga perubahan warna dan bau pun semakin nampak. Contoh (lihat gambar 1.5)

Gambar 1.5
Masyarakat Mencuci Pakaian Dan
Alat Makan



Gambar 1.6
Sampah



Sumber: Hasil Observasi (4 Juni 2022) Sumber: Hasil Observasi (21 Mei 2022)

Salah satu pedagang (penduduk asli atau yang menetap) yakni Tri Agustini (Bunda Galuh) mengatakan:

“Destinasi Wisata Situ Lengkong Panjalu yang semakin maju dan berkembang sampai saat ini bukan semakin terjaga melainkan semakin tercemari, karena banyak masyarakat umum yang diperhatikan kesehariannya, limbah rumah tangga dari rumah masuk ke kawasan situ lengkong Panjalu yang semestinya jangan dilakukan karena ada karuhun yang menjaganya dan karuhunpun menangis melihat keadaan situ semakin kotor” (Salah Satu contoh lihat Gambar 1.6).

Salah Satu narasumber pun mengatakan (Ibu Novi) sebagai pendatang yang berjualan di kawasan Situ Lengkong Panjalu

“bahwasanya penanggung jawab kebersihan itu ada bahkan selalu

diingatkan dalam menjaga kebersihan dan ada aturannya pernah disosialisasikan juga, kegiatan jumsih untuk masyarakat khusus yang tinggal di lingkungan sektor wisata pun ada, orang yang bersih-bersih di lingkungan sektor wisata setiap waktu suka ada yang sudah ditugaskan khusus, sosialisasi kebersihan ada tiap satu bulan sekali dan yang mengontrol pun keseringan bagian kebersihan dan kepala desa”.

Koordinator wisata situ lengkong Panjalu mengatakan juga terkait kebersihan lingkungan sektor wisata yang sudah ada petugas khusus:

“Alhamdulillah penanggung jawab kebersihan di tahun ini sudah ada yang ditugaskan dari UPTD kebersihan. Sehingga bersih-bersih setiap hari dilakukan akan tetapi, bersih bersihnya hanya sebatas menyapu saja tidak membersihkan rerumputan. Jadi hanya membersihkan wilayah bagian yang dilintasi oleh wisatawan saja dan kebersihan lainnya ditanggung jawabi oleh masyarakat setempat dan penanggung jawab kebersihan situ lengkong bukan kebersihan yang selalu menyapu.”

Kebersihan lingkungan sangat perlu diperhatikan dimanapun dan kapanpun utamanya sektor wisata karena untuk menjaga kenyamanan para wisatawan dan untuk mempertahankan penilaian yang baik terhadap sektor wisata. Walau pertiga bulan atau perminggu kebersihan selalu ditegakkan dan sosialisasikan oleh pemerintah desa untuk selalu menjaga kebersihan bagi yang tinggal di lingkungan sektor wisata ataupun bagi para wisatawan. Dan sebagai pemerintah tentu harus lebih memperhatikan kebijakan pengelolaan kebersihannya atau kebijakan yang diterapkan terkait kebersihan air situ lengkong Panjalu untuk selalu dijaga keasliannya. “Walaupun sebenarnya petugas kebersihan sudah dibagi bagi tugas untuk membersihkan wilayah lingkungan sektor wisata situ lengkong Panjalu” Ujar Bapak Udenk selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya masalah keamanan didalam dan diluar kawasan sektor wisata alam situ lengkong Panjalu masih menjadi salah satu permasalahan pengelolaan.

Layaknya dalam suatu sektor wisata dimanapun, keamanan lingkungan menjadi poin utama dalam sektor wisata. Karena tidak dapat dipungkiri hal-hal yang diluar kita yakini tidak akan terjadi baik itu hal-hal yang aneh dan menjamin tidak akan ada dan terjadi karena ada penjaganya (Karuhun) di sektor wisata tersebut, akan tetapi sebagai pemerintah yang memiliki kebijakan dan memiliki kewenangan sebagai pelayan masyarakat tentunya keamanan itu penting ada dalam suatu lingkungan terutama yang harus diadakan dalam sektor wisata. Melihat keamanan di lingkungan sektor wisata situ lengkong Panjalu tidak ada sama sekali baik didalam maupun diluar. Seperti informasi yang penulis dapat dari salah satu pengunjung yang menjadi korban hampir terjadi penghipnotisan kepada dirinya, akan tetapi gagal terjadi karena keadaan yang begitu ramai pengunjung, sehingga yang akan melakukan kejahatan tersebut terhalangi oleh keramaian di lingkungan sektor wisata tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan (Dedi Mulyadi S.E) bahwasanya: “ada pula kejadian yang tenggelam saat akan menyebrang ke nusa dan yang jatuh di wc umum sampai struk”. Hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah. Hasil wawancara UPTD Perparkiran (Haris Sunandar):

“Walau setelah sekian lama dari tahun 2010-2022 belum ada kejadian kembali, keamanan disini tidak menunjuk satu orang melainkan dijaga diperhatikan secara sama-sama dan saya sebagai yang bertanggung jawab di bidang parkirpun memperhatikan dan menjaga akan tetapi kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab saya. Tetapi alhamdulillah pemberian dari Dishub untuk keamanan situ lengkong kemarin memberikan 100 biji pelampung dan Ban, agar tidak ada kejadian seperti putra ridwan kamil”.

Selain itu, salah satu informan (Ibu Novi) sebagai pendatang yang melakukan perdagangan di kawasan situ lengkong Panjalu mengatakan:

“Bahwa keamanan di lingkungan sektor wisata ini dilakukan oleh masyarakat itu sendiri jadi tidak ada pengamanan khusus”. Akan tetapi saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk membuat tim Kordes untuk sektor wisata situ lengkong Panjalu.

Dalam permasalahan ini tentunya pemerintah perlu memperhatikan kembali tanggung jawab dan perannya dalam memahami pengelolaan bahkan pembangunan berkelanjutan yang menjadi akar suatu konsep yang berkaitan dengan dasar-dasar kehidupan untuk menjadi lebih baik. Dalam pengelolaan pembangunan sektor wisata yang berkelanjutan usaha tersebut dapat memperbaiki kualitas hidup manusia untuk jangka panjang dengan memanfaatkan daya dukung ekosistem yang ada (Yoeti, 2016:241). Karena di kawasan situ lengkong Panjalu, infrastruktur, kelestarian lingkungan dan keamanan masih kurang mendukung. Sehingga dapat membuat wisatawan akan kurang nyaman dan akan bernilai tidak baik terhadap lingkungan sektor wisata yang dikunjungi karena ketidak sempurnaan dalam memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang serius dimana banyak masyarakat dan wisatawan yang mempertanyakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait pengelolaannya seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan, pelayanan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Teteng, salah satu Koordinator Wisata Situ Lengkong Panjalu yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun:

“Bahwasanya untuk tahun ini pemerintah sudah mulai berencana akan melaksanakan penataan jalan setapak sekeliling sektor wisata yang akan diperlebar menjadi 4/6 meter, sudah dilakukan pengukuran pula beberapa bulan kebelakang. Dengan anggaran yang kurang dan tidak cukup dari penghasilan PAD, membuat pengelolaan terhambat dari tahun sebelumnya

dan memfokuskan pengelolaan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau hasil dari permintaan masyarakat yang disepakati karena untuk pengelolaan infrastruktur situ lengkong tidak membutuhkan biaya sedikit".

Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"⁶. Dalam uud diatas dalam pelaksanaanya untuk mengatur urusan daerah sepenuhnya diberikan dan dilakukan oleh masing-masing daerah dalam mengelola kebijakan dan urusan rumah tangganya sendiri. UU No 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

⁶ UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (1) dan (2)

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.⁷

Salah satu Pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar yakni Dinas Pariwisata sebagai koordinator yang mengatur dan mengkonsepsikan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi objek wisata yang berada di setiap daerahnya. Dalam PERBUP No. 53 Tahun 2018. Bab II tentang UPTD pada DINPAR Paragraf 2 tugas Pasal (4) UPTD pengelolaan objek wisata wilayah Ciamis dan wilayah Kawali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan objek wisata di wilayah kerjanya⁸. Begitupun tugas dari pengelolaan ini di tanggung jawabi oleh Bidang Destinasi Pariwisata memiliki kewenangan dalam sebagaimana dalam PERBUP No. 84 Tahun 2021. Bab III Pasal 5 Ayat 3 Bagian c. (Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepariwisataaan).

Sebagaimana dalam undang-undang diatas bahwasanya pemerintah perlu menjalankan tugas dan fungsinya dalam memanfaatkan dan mengelola objek wisata dengan semaksimal mungkin sebagaimana dalam RPJMD Kab. Ciamis tahun 2005-2024 bahwasanya ; pemerintah daerah perlu terus melakukan upaya dalam meningkatkan daya saing objek wisata yang ada dan optimalisasi potensi

⁷ UU No 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1

⁸ PERBUP Ciamis No 53 Tahun 2018 Paragraf 2 Pasal 4

destinasi wisata baru dengan melakukan promosi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukungnya. Karena permasalahannya sampai saat ini teridentifikasi; belum optimalnya pengelolaan objek wisata yang ada dan masih banyaknya potensi wisata yang belum tergali. Dan jelas dalam matriks misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang memiliki misi, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam prioritas pentahapan RPJMD Pemerintah Daerah Kab.Ciamis dalam rangka mencapai kabupaten Ciamis yang Maju, Mandiri dan Sejahtera tahun 2025, sebagaimana tabel dibawah yang disusun sebagai tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kab. Ciamis.

Tabel 1.2
Prioritas Pentahapan RPJMD Pemda Kab. Ciamis

2005-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2025
RPJMD Tahap 1 Tahap Penyiapan	RPJMD Tahap 2 Tahap Pembangunan	RPJMD Tahap 3 Tahap Pemantapan Kemandirian	RPJMD Tahap 4 Tahap Pencapaian Kesejahteraan
Penyiapan kemajuan daerah kabupaten ciamis dengan menekankan pada perkembangan sektor agribisnis dan pariwisata, dengan memfokuskan pada peningkatan iklim investasi dan pengembangan jiwa kewirausahaan, serta jaringan kemitraan.	Pengembangan kemajuan yang mantap, menuju kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ditekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan iptek, serta upaya-upaya menggali potensi yang dimiliki daerah, seperti pelestarian	Pemekaran wilayah dijadikan sebagai momentum untuk memantapkan pengembangan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya menuju pada kemandirian dan pencapaian daya saing yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya	Memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang kokoh berlandaskan kemandirian dan keunggulan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai saat ini, serta upaya peningkatan sumber daya manusia.	lingkungan, peningkatan infrastruktur dan kerjasama sebagai upaya penguatan perekonomian masyarakat.	manusia, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, ketersediaan infrastruktur yang baik serta pengelolaan lingkungan, dengan fokus pada pembangunan.	kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki daya saing, infrastruktur yang baik dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.
---	--	---	--

Sumber : RPJPD Kabupaten Ciamis 2005 – 2025 (Perubahan Ke-11)

Maka dari itu peneliti meneliti permasalahan terkait kebijakan yang sudah tercatat dalam RPJMD terkait kebijakan yang sudah dan belum sudah memenuhi aspek pengelolaan atau belum sama sekali dalam pengelolaan infrastruktur, kebersihan lingkungan dan keamanan lingkungan kebijakan pengelolaan seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah sehingga masih banyak permasalahan yang kurang mendukung terhadap kesempurnaan dalam memenuhi fasilitas sektor wisata. Dengan adanya beberapa pertanyaan yang muncul dari permasalahan ini tentunya pemerintah akan melihat dan lebih tergerak terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya dengan kebijakan yang sudah disepakati bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan sektor wisata alam dan budaya Situ Lengkung Panjalu oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, dan tetap pada fokus utamanya yakni kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sektor wisata alam dan budaya Situ Lengkong Panjalu sesuai dengan fokus atau tujuan peneliti terhadap apa yang sudah terlihat di lapangan banyaknya fasilitas yang kurang di kelola dengan baik oleh pemerintah terkait infrastruktur, keamanan dan kebersihan lingkungan dengan kebijakan yang belum dan sudah tertulis sehingga belum maksimal dalam pengelolaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sektor wisata alam dan budaya Situ Lengkong Panjalu oleh Pemerintah Kab Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk bahan masukan pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, dalam ilmu politik dan pemerintahan, terkait kewenangan, fungsi dan kebijakan pemerintah yang sudah tercatat dalam UU sebagai pengelola, pelayanan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini:

1. Dapat memberikan manfaat dan pengetahuan untuk para pembaca,

utamanya dikalangan akademisi, dosen ataupun umum, dan dapat memberikan kontribusi pula terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan UNSIL utamanya program studi ilmu politik dan FISIP di Univ manapun.

2. Mampu dijadikan bahan pengetahuan dan perhatian bagi pemerintah kabupaten Ciamis (camat, kepala desa, UPTD kepariwisataan, koordinator wisata, Dinas Pariwisata, UPTD Kebersihan) dalam upaya pengelolaan sektor wisata.
3. Dan bagi para masyarakat yang berada di lingkungan sektor wisata alam situ lengkong Panjalu atau masyarakat umum untuk memperhatikan dalam menjaga lingkungannya dengan baik serta para wisatawan yang berkunjung dan seluruh akademisi untuk bisa mengingatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan akan tanggung jawabnya yang harus dijalankan.